

## Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force

Angga Reza Prabowo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Korespondensi: [Lithium\\_122003@yahoo.com](mailto:Lithium_122003@yahoo.com)

---

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.169> | halaman: 176 - 195

---

Dikirim: 01-07-2022 | Diterima: 31-07-2022 | Dipublikasikan: 31-07-2022

---

### Abstrak

Guna mencapai Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia/PMD, diplomasi maritim memiliki peran yang penting. Berkaitan perihal dimaksud, Indonesia dan Australia memiliki landasan kerja sama di bidang maritim berdasarkan Joint Declaration on Maritime Cooperation tahun 2017, dan diperkuat dengan Plan of Action tahun 2018. Salah satu instansi pendukung pelaksanaan Plan of Action adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia/Bakamla dan Australian Border Force/ABF. Disaat pelaksanaan Plan of Action, terjadi kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi implementasi kerja sama. Di sisi lain, berdasarkan konsep diplomasi maritim sebagaimana dikemukakan Le Mière, tulisan turut menganalisis bentuk dan tujuan diplomasi maritim antara Bakamla-ABF. Terkait implementasi, kedua instansi dapat menyesuaikan kondisi pandemi, dengan mengubah metode kegiatan sehingga diplomasi tetap terselenggara walaupun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Bentuk diplomasi maritim antara Bakamla-ABF tidak sepenuhnya menyerupai yang disampaikan Le Mière. Tujuan diplomasi maritim Bakamla-ABF adalah untuk membangun kepercayaan.

**Kata kunci:** diplomasi maritim; Bakamla-ABF; pembangunan kepercayaan.

---

## I. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2014 mengemukakan dasar perspektif pembangunan nasional Indonesia ke depan berlandaskan Poros Maritim Dunia (PMD). Perspektif tersebut menempatkan aspek kemaritiman selaku dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Melihat konstelasi geografis Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan terdiri dari gugusan kepulauan, konsepsi PMD akan mengembalikan karakter bangsa serta negara Indonesia sebagai negara maritim.

Sebagai landasan bagi pembangunan nasional, PMD dibangun atas lima pilar utama. Sebagaimana disampaikan Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur atau *East Asia Summit*, kelima pilar utama PMD adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia; menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan; dan membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang).

Sehubungan dengan keamanan laut, diplomasi akan menjadi unsur pendukung terwujudnya stabilitas keamanan laut. Secara umum, diplomasi berkaitan dengan tata kelola hubungan antar negara atau antara negara dan aktor lainnya (Barston, 1988), atau negosiasi antara entitas politik yang saling mengakui kemerdekaan masing-masing (Watson, 2005). Sedangkan menurut *Webster's Dictionary*, diplomasi berarti seni dan praktik dalam melakukan perundingan antarbangsa, atau keterampilan mengelola segala urusan luar negeri tanpa menimbulkan permusuhan (Shoelhi, 2011). Berdasarkan definisi umum tersebut, maka diplomasi akan menjadi suatu perangkat bagi hubungan antar negara dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan selaku kepentingan dari negara-negara bersangkutan.

Pada konteks spesifik di bidang maritim, diplomasi diaktualisasikan melalui penerapan diplomasi maritim. Secara definisi, diplomasi maritim adalah pengelolaan hubungan internasional melalui domain maritim (Le Mière, 2014). Perihal tersebut tidak bermakna bahwa penggunaan diplomasi untuk mengelola tensi di bidang maritim dilaksanakan melalui kodifikasi hukum internasional, namun menggunakan aset maritim untuk mengelola hubungan dimaksud (Le Mière, 2014). Selain itu, diterangkan bahwa diplomasi maritim mencakup berbagai spektrum kegiatan, mulai dari langkah-langkah kooperatif seperti kunjungan ke pelabuhan (*port visits*), latihan, dan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) hingga penyebaran persuasif (*persuasive deployment*) serta tindakan koersif (Le Mière, 2014).

Lebih lanjut, diterangkan bahwa diplomasi maritim terdiri dari tiga kategori, yaitu Diplomasi Maritim Kooperatif (*Cooperative Maritime Diplomacy*); Diplomasi Maritim Persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*); dan Diplomasi Maritim Koersif (*Coercive Maritime Diplomacy*) (Le Mière, 2014). Dalam pelaksanaannya, diplomasi maritim dapat diselenggarakan oleh berbagai aktor di sektor maritim, baik instansi militer maupun non militer dan paramiliter. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa instansi paramiliter maritim (*maritime constabulary*) di berbagai belahan dunia adalah aktor utama dalam diplomasi maritim (Laksmiana, Gindarsah & Mantong, 2018).

Terkait dengan Indonesia, diplomasi maritim dioperasionalkan melalui tiga dimensi, yaitu dimensi kedaulatan; dimensi keamanan; dan dimensi kesejahteraan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional/Pusat P2K-OI, Kementerian Luar Negeri, 2016). Dimensi kesejahteraan dioperasionalkan melalui diplomasi ekonomi kelautan; dimensi kedaulatan dilihat melalui kedaulatan politik dan keutuhan wilayah yang pelaksanaannya diarahkan pada penguatan hukum dan perjanjian maritim, percepatan penyelesaian perundingan perbatasan, penguatan pertahanan dan ketahanan maritim; sedangkan dimensi keamanan dilaksanakan untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan di perairan Indonesia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional/Pusat P2K-OI, Kementerian Luar Negeri, 2016).

Mempertimbangkan konstelasi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan terdapatnya sepuluh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia, diplomasi maritim pada dimensi keamanan menjadi perangkat untuk menjaga maupun mewujudkan stabilitas keamanan. Disebabkan laut menjadi media penghubung antara Indonesia dan negara tetangga, maka interdependensi dalam bidang keamanan memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. Kedekatan wilayah berpotensi besar terhadap keamanan karena banyak ancaman menjadi lebih mudah berpindah pada jarak yang pendek dibandingkan jarak jauh, sehingga kedekatan tersebut akan memiliki dampak paling kuat terhadap interaksi keamanan dan terlihat jelas di sektor militer, politik, sosial serta lingkungan (Buzan and Waever, 2003).

Dengan a terciptanya interdependensi dalam bidang keamanan, kebutuhan terhadap pembentukan kerja sama internasional menjadi signifikan. Terdapatnya berbagai bidang di dalam kehidupan internasional seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan maupun keamanan, menimbulkan beragam kepentingan yang mengakibatkan masalah sosial sehingga untuk mencari solusi atas permasalahan maka beberapa negara membentuk suatu kerja sama internasional (Perwita dan Yani, 2011). Di sisi lain, munculnya aktor non negara yang mempengaruhi keamanan turut menjadi faktor pendorong dibutuhkannya kerja sama internasional atau kerjasama antar negara.

Sehubungan dengan itu, diketahui bahwa Australia merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan kerja sama maritim erat dengan Indonesia. Keeratan kerja sama tersebut tidak hanya dilandasi kedekatan geografis kedua negara yang dihubungkan oleh laut, namun juga terdapatnya keselarasan komitmen dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan serta penanggulangan kejahatan lintas negara melalui laut. Perihal sebagaimana dimaksud, ditegaskan pada *dokumen Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia Tahun 2017* yaitu “*Reaffirming: 1) Our commitment to unimpeded lawful commerce, freedom of navigation and overflight and sustainable use of living marine resources in accordance with international law; 2) Our commitment to maintaining and promoting peace, security and stability in the region, full respect for legal and diplomatic processes, and to the peaceful resolution of maritime disputes in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea; and 3) Our commitment to addressing the challenges posed by transnational crime committed at sea.*”

Dalam rangka mendukung implementasi *Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*, kemudian di tahun 2018 kedua negara membentuk *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*. Area prioritas kerja sama yang tercantum pada *Plan of Action (POA)* terdiri dari 9 area, yaitu 1) *Economic Development, Maritime Connectivity and the Blue Economy*; 2) *Strengthen Maritime*

*Security and Combat Transnational Crime Committed at Sea; 3) Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as well as Crimes in the Fisheries Sector; 4) Improve Maritime Safety and Prevent and Respond to Marine Environment Pollution; 5) Improve Search and Rescue Coordination and Disaster Risk Management; 6) Marine Science and Technology Collaboration; 7) Sustainable Management of Marine Resources and Blue Carbon; 8) Maritime Cultural Heritage; 9) Enhanced Dialogue and Engagement in Regional and Multilateral Fora (Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia, 2018).*

Selain mengatur mengenai area prioritas dari kerja sama, diketahui pula lampiran/ *Annex* dokumen POA turut mencantumkan kegiatan spesifik, instansi penanggung jawab dari pihak Indonesia dan Australia, serta kerangka waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) merupakan salah satu instansi yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan spesifik sebagaimana tercantum pada *Annex* POA. Adapun kegiatan spesifik yang di dalamnya terdapat keterlibatan Bakamla dan instansi mitra dari pihak Australia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Kegiatan Spesifik Bakamla-ABF Dalam Kerangka *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*

<b>II. Strengthen Maritime Security and Combat Transnational Crime at Sea</b>			
<b>No</b>	<b>Specific Activities</b>	<b>Responsible Agencies</b>	<b>Timeframe</b>
1.	<i>Joint Capacity Building Exercise</i>	ABF/Bakamla	<i>Where appropriate</i>
2.	<i>Ship Search Training</i>	ABF/Bakamla, KKP, DGCE Kemkeu, Polair	<i>Where appropriate</i>
3.	<i>Maritime Security Cooperation Arrangement</i>	DIBP/Bakamla	<i>Ongoing</i>
4.	<i>Maritime Domain Awareness Capacity Building, including Through Information Sharing, Technical Training and Exchanges</i>	ABF/Bakamla	<i>Where appropriate</i>
5.	<i>Maritime Security Desktop Exercise</i>	ABF/Bakamla	<i>Annually</i>
6.	<i>JCLEC Maritime Enforcement Stream</i>	ABF/Bakamla	<i>Ongoing</i>
<b>III. Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing as well as Crimes in the Fisheries Sector</b>			
<b>No</b>	<b>Specific Activities</b>	<b>Responsible Agencies</b>	<b>Timeframe</b>
1.	<i>Conduct joint capacity building exercises between civilian maritime enforcement agencies and navy, including port visits</i>	AFMA, ABF, RAN/Bakamla, KKP, TNI AL	<i>Where appropriate</i>
<b>IX. Enhanced Dialogue and Engagement in Regional and Multilateral Fora</b>			
<b>No</b>	<b>Specific Activities</b>	<b>Responsible Agencies</b>	<b>Timeframe</b>
1.	<i>ABF-Bakamla Senior Officials Meeting</i>	ABF/Bakamla	<i>Annual – dates variable</i>
2.	<i>Participation at HACGAM (Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting Forum)</i>	ABF/Bakamla	<i>Annual – dates variable</i>

**Sumber:** *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia, 2018.* Setelah diolah kembali.

Keterangan:

1. ABF = Australian Border Force
2. AFMA = Australian Fisheries Management Authority
3. RAN = Royal Australian Navy
4. KKP = Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. DGCE Kemenkeu = Directorate General of Customs and Excise / Direktorat Jenderal Bea Cukai

- |           |  |
|-----------|--|
|           | Kementerian Keuangan                       |
| 6. Polair | = Kepolisian Perairan                      |
| 7. TNI AL | = Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |

Beberapa tahun setelah dibentuknya POA, pada tahun 2020 dunia dihadapkan pada kondisi penyebaran wabah *Coronavirus Diseases 2019* atau COVID-19. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian menyebar secara masif ke sebagian besar negara dan menginfeksi orang dalam jumlah yang sangat besar sehingga kemudian di bulan Maret 2020 Direktur Jenderal *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi (WHO, 2020). Kondisi pandemi COVID-19 menjadi penyebab terjadinya perubahan tatanan kehidupan dan mempengaruhi terhadap teknis maupun agenda pelaksanaan kerja sama internasional.

Di dalam kondisi pandemi selaku faktor pendorong terjadinya perubahan yang cepat dan berdampak luas bagi dimensi kehidupan berbangsa serta bernegara, membuat pemerintah harus bekerja ekstra guna menangani pandemi COVID-19. Pada konteks Indonesia, dalam rangka penanganan danantisipasi dampak pandemi COVID-19 maka diambil langkah kebijakan terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2020, antara lain *refocusing* anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19 serta penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan serta dampak COVID-19 (Kementerian Keuangan, 2020). Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengemukakan bahwa untuk *refocusing* rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk direlokasi (Kementerian Keuangan, 2020).

Terkait pelaksanaan kerja sama internasional atau secara khusus mengenai implementasi *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Indonesia-Australia*, kondisi pandemi COVID-19 dan terdapatnya kebijakan pelaksanaan belanja K/L memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan. Sehubungan dengan perihal dimaksud, Bakamla sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab bagi pelaksanaan kegiatan spesifik sebagaimana tercantum dalam *Annex POA*, berada pada posisi untuk mendukung kebijakan pemerintah di masa pandemi namun di sisi lain, turut berupaya maksimal agar kegiatan spesifik tersebut dapat diselenggarakan menyesuaikan kondisi yang terjadi. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menganalisis bentuk diplomasi maritim berdasarkan kegiatan spesifik yang diselenggarakan oleh Bakamla dan *Australian Border Force* (ABF), serta analisis pelaksanaan kerjasama/kegiatan spesifik di tengah kondisi pandemi COVID-19 yaitu pada rentang tahun 2020 hingga 2021.

## II. Metode / Metodologi

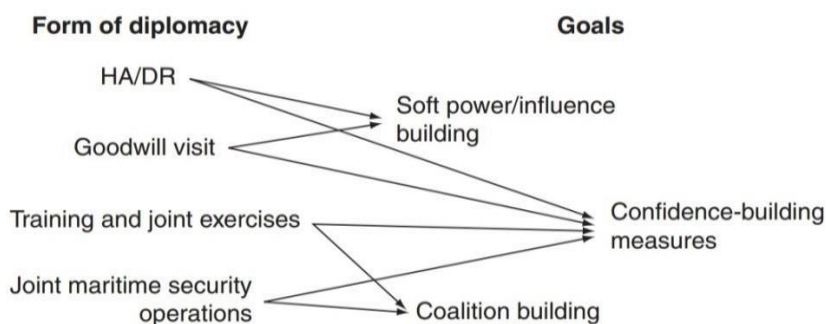
Metode yang digunakan pada makalah ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik serta dengan cara deskripsi (Moleong, 2014). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen (Sugiyono, 2011). Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku dan artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, *Record Of Discussion*, dokumen kerjasama luar negeri, laporan instansi pemerintah, berita dari media resmi pemerintah serta media umum, dan sumber

lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik *data display*, *data reduction*, dan *conclusions* (Miles & Huberman, 1994).

Dalam rangka menganalisis implementasi kerja sama antara Bakamla dengan ABF, digunakan konsep Diplomasi Maritim sebagaimana dikemukakan oleh Le Mière. Pada tataran konseptual, diplomasi maritim dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu Diplomasi maritim kooperatif, Diplomasi maritim persuasif, dan Diplomasi maritim koersif (Le Mière, 2014). Diplomasi maritim kooperatif merupakan bentuk diplomasi maritim yang mengedepankan unsur kerja sama di antara para pihak. Pada tingkat pelaksanaan, diplomasi maritim kooperatif diaktualisasikan melalui beberapa jenis kegiatan seperti misi bantuan kemanusiaan/tanggap bencana (*Humanitarian Assistance/ Disaster Response* atau HADR) dan sebagainya.

Selain HADR, pelaksanaan kegiatan dalam kerangka diplomasi maritim kooperatif juga dapat menggunakan atau melibatkan aset maritim yang memiliki kemampuan penggunaan kekuatan (Le Mière, 2014). Walaupun diplomasi maritim kooperatif dapat menggunakan aset maritim dengan kemampuan penggunaan kekuatan, namun hal tersebut tidak ditujukan untuk menimbulkan kekerasan atau melakukan perlawanan terhadap pihak lain, tetapi guna mendukung kegiatan yang secara murni bersifat damai (Le Mière, 2014). Contoh kegiatan sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan Patroli Terkoordinasi (Patkor), latihan bersama yang membutuhkan penggunaan senjata seperti latihan menembak, dan sebagainya.

Keragaman kegiatan dalam konteks diplomasi maritim kooperatif juga dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pertukaran personel (*Personel Exchanges*). Melalui pertukaran personel diharapkan akan membentuk hubungan dan keselarasan pemahaman antar personal dari negara yang terlibat pada kegiatan diplomasi maritim kooperatif. Selain itu, dijelaskan bahwa program pendidikan, kunjungan personal dan pertemuan kolaboratif (*Collaborative Meetings*) juga dapat dilihat sebagai upaya pembangunan kepercayaan (*Confidence Building Measures*) serta pengaruh (*Influence Building*) selaku bentuk dari diplomasi maritim kooperatif (Le Mière, 2014).



**Gambar 1.** Bentuk dan Tujuan Diplomasi Maritim Kooperatif

**Sumber :** Le Mière, Christian. *Maritime Diplomacy in the 21st Century Drivers and Challenges*, 2014.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa seluruh kegiatan dalam kerangka diplomasi maritim kooperatif memiliki kesamaan tujuan politik yang hendak dicapai oleh para pihak (Le Mière, 2014). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya, baik untuk membangun pengaruh (*Influence Building*), membangun koalisi atau aliansi (*Coalition/Alliance Building*), dan membangun kepercayaan (*Confidence-Building Measures/CBM*) (Le Mière, 2014). Adapun bentuk dari diplomasi maritim dan tujuan yang hendak dicapai dapat dilihat pada gambar 1.



Bentuk lainnya dari diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim persuasif. Diplomasi maritim persuasif pada dasarnya berada di antara bentuk diplomasi maritim kooperatif dan diplomasi maritim koersif (Le Mière, 2014). Perbedaan antara diplomasi maritim persuasif dengan kooperatif dapat dilihat dari kurangnya tingkat kolaborasi untuk menimbulkan efek diplomatik yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perbedaan dengan diplomasi maritim koersif, bahwa diplomasi maritim persuasif tidak ditujukan untuk mencegah atau memaksa (Le Mière, 2014).

Diplomasi maritim persuasif ditujukan untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim atau kekuatan nasional dari suatu negara tertentu, dan membangun prestise negara di panggung internasional (Le Mière, 2014). Berdasarkan tujuan tersebut maka diplomasi maritim persuasif memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan perihal yang dikenal dengan istilah “*Showing The Flag*” (Le Mière, 2014). Oleh karena itu negara yang menerapkan diplomasi maritim persuasif akan menggunakan kekuatan maritimnya untuk memberi sinyal terkait kemampuan dan kehadiran atau eksistensi negaranya, tanpa bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dari negara lain (Le Mière, 2014).

Bentuk terakhir dari diplomasi maritim yaitu diplomasi maritim koersif. Pada dasarnya, diplomasi maritim koersif memiliki tingkat kesamaan yang tinggi dengan pola maupun bentuk diplomasi kapal perang (*Gunboat Diplomacy*). Terkait perihal dimaksud, diplomasi maritim dilakukan dengan penggunaan instrumen kekuatan maritim atau *maritime forces* untuk menjaga kepentingan nasional suatu negara tertentu di perairan (Rijal, 2019).

### III. Hasil, Analisis, dan Pembahasan

#### 3.1 Implementasi Kerja sama antara Bakamla-ABF Tahun 2020 dan 2021

Sebagaimana tercantum dalam *Annex Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia*, kegiatan kerja sama antara Bakamla dengan ABF terdiri dari 9 jenis kegiatan. Sehubungan itu, ditengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan timbulnya perubahan pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki kecenderungan tinggi terhadap implementasi kegiatan kerja sama tersebut. Oleh sebab itu, akan dibahas mengenai implementasi kegiatan dimaksud.

##### 3.1.1 Joint Capacity Building Exercise

Kegiatan *Joint Capacity Building Exercise* merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka membangun dan meningkatkan kapasitas Bakamla. Serangkaian kegiatan telah diselenggarakan untuk mendukung implementasi kerja sama tersebut. Pada tahun 2019, Bakamla mengirimkan sebanyak 6 personel untuk mengikuti kegiatan *English Language Training/ELT* di *University of Adelaide* yang dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu pelatihan bulan Februari hingga Mei 2019 dan bulan April hingga Juli 2019.

Selanjutnya pada tahun 2020, pelatihan ELT diselenggarakan pada bulan Februari-Mei (gelombang I) dan bulan April-Juli (gelombang II). Bakamla telah mengirimkan 3 orang personil mengikuti pelatihan ELT gelombang I di Australia, namun saat berlangsungnya pelatihan, kondisi penyebaran virus semakin signifikan sehingga diputuskan bagi personel tersebut untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan pelatihan secara virtual/daring. Sedangkan pelatihan gelombang II tahun 2020 maupun pelatihan di tahun 2021 ditunda pelaksanaannya hingga situasi memungkinkan (Bakamla, 2022).

Bentuk kegiatan lainnya yang mendukung implementasi kerja sama *Joint Capacity Building Exercise* adalah kursus bahasa Inggris di Jakarta. Pelaksanaan kursus sebagaimana dimaksud telah berlangsung dari tahun 2018 yang dilaksanakan secara luring atau pertemuan fisik. Namun setelah terjadi pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020 dan 2021, metode pelaksanaan kursus diubah menjadi daring. Adapun lembaga yang turut berpartisipasi mendukung kursus tersebut antara lain Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia dan *English Today* (Bakamla, 2022).

### 3.1.2 Ship Search Training

Kegiatan *Ship Search Training* selama masa pandemi COVID-19 (tahun 2020 dan 2021) untuk sementara ditunda pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan pelatihan dilaksanakan melalui metode pertemuan fisik sehingga dapat meningkatkan potensi penyebaran virus COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi, Bakamla dan ABF secara rutin menyelenggarakan pelatihan *Ship Search Training* atau *Vessel Search Course*, seperti 1) *Vessel Search Course* bulan Maret hingga April 2018 di ABF College; 2) *Vessel Search and Confined Space Risk Assessment 1* tanggal 4 hingga 9 Maret 2019 di Pontianak; 3) *Vessel Search and Confined Space Risk Assessment 2* tanggal 11 hingga 16 Maret 2019 di Ambon (Bakamla, 2022); serta 4) *Vessel Search Course* tanggal 19 hingga 23 Agustus 2019 di JCLEC Semarang (Bakamla, 2022).

Pada tahun 2020 awal, sebelum merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia telah diselenggarakan dua kali pelatihan *Vessel Search and Sea Port Intelligence*. Pelatihan tersebut dilaksanakan bulan Januari 2020 dan dihadiri perwakilan dari Bakamla, Polair, *Philippine Coast Guard*, *Philippine National Police*, serta Detasemen Khusus 88 Polri (ABF, 2020). Setelah merebaknya virus COVID-19 di berbagai negara dan terdapatnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat serta pembatasan lalu lintas orang asing melalui pintu pemeriksaan imigrasi, baik di Indonesia maupun negara lainnya, maka kegiatan pelatihan *Ship/Vessel Search* belum dapat diselenggarakan.

### 3.1.3 Maritime Security Cooperation Arrangement

Kegiatan penyusunan kerjasama keamanan maritim/*maritime security cooperation arrangement* telah dilaksanakan dan menghasilkan dokumen *Arrangement Between Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (The Maritime Security Agency of The Republic of Indonesia) and The Department of Immigration and Border Protection as Represented by The Australian Border Force on Maritime Security Cooperation* tanggal 17 November 2017.

### 3.1.4 Maritime Domain Awareness Capacity Building, including Through Information Sharing, Technical Training and Exchanges

Kegiatan *Maritime Domain Awareness/MDA Capacity Building* merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan pertukaran informasi dan pelatihan. Terkait pertukaran informasi, kegiatan sebagaimana dimaksud salah satunya diaktualisasikan saat penyelenggaraan Patkor Gannet, yaitu melalui pertukaran data dan informasi maupun hasil pemantauan yang kemudian ditindaklanjuti oleh unit operasi. Di tahun 2019, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kunjungan *Counsellor ABF Superintendent Benjamin Honey* dan *Operation Officer Maritime Border Command (MBC) Andrew Waugh* ke Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut/KPIML Bakamla untuk membahas hasil pemantauan melalui dashboard masing-masing instansi dalam pelaksanaan Patkor Gannet 19-1 (Tentara Nasional Indonesia, 2019).

Selain itu, kegiatan *MDA Capacity Building* diaktualisasikan melalui pelaksanaan pelatihan. Pada bulan Agustus 2019, telah dilaksanakan pelatihan *Maritime Control Surveillance Training* di



JCLEC Semarang. Selanjutnya di bulan Desember 2020, diselenggarakan pelatihan MDA secara virtual/daring yang diikuti oleh sebanyak 5 orang peserta dari Bakamla (Bakamla, 2022). Sedangkan di tahun 2021, diselenggarakan pelatihan MDA secara virtual/daring pada bulan Maret 2021 yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/PSDKP KKP dan Bakamla. Adapun pemateri dalam kegiatan dimaksud, adalah *Singapore Information Fusion Centre*, MBC, dan *Australian Fisheries Management Authority/AFMA* (Stasiun PSDKP Kupang, 2021).

### 3.1.5 Maritime Security Desktop Exercise (MSDE)

MSDE merupakan kegiatan yang secara rutin diselenggarakan oleh Bakamla dan ABF sejak tahun 2009. Pada awalnya kegiatan MSDE hanya diperuntukan bagi Bakamla dan ABF, namun sejak tahun 2010 turut mengundang partisipasi dari negara lain yang waktu itu sekitar 11 negara. Kemudian seiring perkembangan dan kebutuhan kerja sama guna meningkatkan keamanan laut, negara yang berpartisipasi dalam kegiatan MSDE diselaraskan dengan kegiatan HACGAM (Bakamla, 2022).

Setahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2019, kegiatan MSDE ke-9 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18-20 Juni 2019. Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi 16 negara dan dihadiri oleh 51 orang peserta (Bakamla, 2022). Selain itu turut dibahas dan didiskusikan mengenai skenario kasus pelanggaran hukum di perairan laut internasional yang dipimpin Prof. Stuart Kaye dari *Australian National Centre for Ocean Resource and Security* (ANCORS), *Universitas Wollongong*, Australia (Bakamla, 2019).

Pada tahun 2020, kegiatan MSDE ke-10 direncanakan pada bulan Juni (Bakamla, 2022). Karena kondisi pandemi COVID-19 yang saat itu sedang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya, maka MSDE ke-10 tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna meminimumkan potensi penularan virus melalui pembatasan kegiatan masyarakat dan terkait *refocusing* serta realokasi anggaran bagi penanganan pandemi COVID-19, keputusan penundaan kegiatan MSDE ke-10 dinilai sudah tepat karena jika kegiatan tersebut dilaksanakan maka akan mengumpulkan orang dari berbagai negara di suatu tempat tertentu sehingga tingkat resiko terjadinya penularan menjadi lebih tinggi.

Pelaksanaan MSDE ke-10 baru dapat diselenggarakan pada tanggal 15-18 Juni 2021 di Jakarta. Berbeda dengan penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, MSDE ke-10 menggunakan metode *hybrid* yaitu melalui pertemuan secara fisik yang terbatas dan secara virtual/daring (JCLEC, 2021). Kegiatan diselenggarakan secara bersama antara Bakamla, ABF, dan *Maritime Border Command/MBC* serta dihadiri oleh 36 negara perwakilan anggota HACGAM dan *Indian Ocean Rim Association/IORA* (Bakamla, 2021).

Pada pelaksanaan MSDE ke-10 tahun 2021, dibahas mengenai skenario-skenario permasalahan keamanan dan keselamatan laut yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Fasilitator dalam proses pembahasan dan diskusi diakomodir oleh Indonesia dan Australia, yaitu Direktur ANCORS, *Universitas Wollongong* Australia Prof. Stuart Kaye serta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Gusman Catur Siswandi, Ph.D dan Kepala Subdirektorat Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R (Bakamla, 2021). Melalui pelaksanaan kegiatan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman regional terhadap penerapan hukum internasional (Bakamla, 2021).

### 3.1.6 JCLEC Maritime Enforcement Stream

Kegiatan JCLEC *Maritime Enforcement Stream* dilakukan melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh JCLEC. Pada saat belum terjadinya pandemi COVID-19 telah dilaksanakan berbagai kegiatan, seperti *Operational Command Course* bulan Februari 2019 (detiknews, 2019) maupun *Border Security Workshop* atau Lokakarya Keamanan Perbatasan bulan November 2019. Sedangkan di tahun 2020, salah satunya telah diselenggarakan pelatihan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS Training) bulan November 2020 yang dihadiri secara luring atau tatap muka oleh perwakilan dari Bakamla, TNI AL, Polair, Bea Cukai, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai/KPLP, dan PSDKP. Adapun pengajar dalam kegiatan dimaksud, antara lain Prof. Stuart Kaye dan Prof. Rob McLaughlin dari ANCORS serta CMDR Tristan Kousgaard dari *Royal Australian Navy* (Bakamla, 2020).

Pada tahun 2021, Bakama bekerja sama dengan JCLEC, ABF dan ANCORS menyelenggarakan pelatihan *Maritime Regulation and Enforcement Training* tanggal 25-29 Januari. Pelatihan tersebut diselenggarakan secara daring yang menyertakan partisipasi dari PSDKP, Bea Cukai, KPLP, Polri dan TNI AL (Bakamla, 2021). Disertakannya partisipasi dari instansi terkait lainnya, diharapkan dapat terbentuk keselarasan pemahaman terhadap ketentuan hukum internasional dan penegakan hukum terhadap kejahatan non-tradisional serta bersifat lintas batas negara. Selain itu diselenggarakan pula beberapa pelatihan secara daring di tahun 2021 seperti *United Nation Convention on the Law of the Sea and Maritime Regulation Enforcement Training* bulan November (ABF, 2021).

### 3.1.7 Conduct Joint Capacity Building Exercises between Civilian Maritime Enforcement Agencies and Navy, Including Port Visits

Kegiatan *Conduct Joint Capacity Building Exercise* diaktualisasikan melalui penyelenggaraan Patroli Terkoordinasi/Patkor atau *Coordinated Patrol/Corpat* antara Indonesia dan Australia. Jika merujuk kepada *Annex Plan of Action* tahun 2018, kegiatan Patkor tidak secara tertulis tercantum pada butir kegiatan spesifik Bakamla-ABF, namun bila melihat dalam dokumen dokumen Pengaturan (*Arrangement*) antara Bakamla-ABF tahun 2017 tercantum bahwa salah satu ruang lingkup kerja sama kedua instansi adalah Patkor dan Latihan Bersama (*Coordinated Patrol and Joint Exercise*). Selain itu, melihat terdapatnya kesamaan para pihak yang terkait pelaksanaan *Conduct Joint Capacity Building Exercise* dan Patkor yaitu AFMA, ABF, Bakamla, serta KKP maka kegiatan Patkor merupakan bagian dari kegiatan *Conduct Joint Capacity Building Exercise*.

Kegiatan Patkor instansi sipil Indonesia dan Australia, sebelum tahun 2018 dinamakan *Operation Shearwater* namun terjadi perubahan nama menjadi *Operation Gannet* di tahun 2018. Pelaksanaan Patkor Gannet sebelum terjadinya pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu bulan Mei dan September (Bakamla, 2020) dengan melibatkan unsur patroli laut serta udara dari Bakamla, KKP, ABF/MBC, dan AFMA. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi, pelaksanaan Patkor Gannet tidak dapat diselenggarakan karena fokus saat itu adalah mendukung secara penuh kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Patkor Gannet kembali diselenggarakan di bulan Mei 2021 dengan sebutan Gannet-5. Dalam rilis media bersama antara ABF, AFMA, Bakamla dan KKP dijelaskan bahwa Patkor ini merupakan kunci utama terkait komitmen guna memperkuat keamanan maritim, sebagai bagian dari *Maritime Plan of Action* yang mengimplementasikan *Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation*. Tujuan dari operasi Gannet-5 adalah untuk mendeteksi,

mencegah, dan melawan aktivitas ilegal di laut serta memperkuat kerjasama antara instansi Indonesia dan Australia. Adapun fokus dari operasi termasuk IUU Fishing, penyelundupan manusia, perlindungan lingkungan dan kejahatan lintas negara di wilayah laut bagian timur Indonesia yang berbatasan dengan wilayah laut Australia (AFMA, 2021).

Berdasarkan implementasi sebagaimana dijelaskan, terlihat bahwa pelaksanaan Patkor sempat tertunda disebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Mempertimbangkan kondisi di dalam negeri sedang berjuang untuk menangani pandemi di tahun 2020, maka Bakamla sebagai bagian dari pemerintah senantiasa mendukung kebijakan terhadap penanganan pandemi guna melindungi masyarakat. Setelah kondisi menjadi relatif stabil, lalu di tahun 2021 kembali dilaksanakan Patkor Gannet selaku bentuk aktualisasi implementasi *Plan of Action*.

### 3.1.8 ABF-Bakamla Senior Official Meeting (SOM)

Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan antara pimpinan kedua instansi dalam rangka membahas berbagai permasalahan, baik terkait kondisi keamanan laut maupun teknis pelaksanaan kerja sama. Pada konteks implementasi, sebelum pandemi COVID-19 telah dilaksanakan SOM ketiga antara Bakamla-ABF (*3rd SOM Bakamla-ABF*) di Canberra, Australia tanggal 28–29 Maret 2019 (Bakamla, 2019). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bakamla periode tahun 2018-2019 Laksamana Madya TNI Taufiqerrochman selaku Ketua Delegasi Indonesia dan Komisioner ABF Michael Outram APM selaku Ketua Delegasi Australia.

Disebabkan pandemi COVID-19, maka kegiatan SOM keempat (*4th SOM*) tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020. Pada awalnya, kegiatan 4rd SOM Bakamla-ABF akan diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan MSDE ke-10 di pertengahan tahun 2020 (Bakamla, 2022), namun karena kondisi pandemi COVID-19 terus mengalami peningkatan di Indonesia maka kegiatan tidak dapat diselenggarakan. Selain itu, diterbitkannya kebijakan *refocusing* serta realokasi anggaran sebagaimana tercantum didalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, turut menjadi perhatian sehingga pertemuan *4th SOM* Bakamla-ABF ditunda pelaksanaannya.

Pertemuan *4th SOM* Bakamla-ABF baru dapat dilaksanakan di tahun 2021. Mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 masih terjadi kala itu, pelaksanaan *4th SOM* dilaksanakan secara virtual/daring tanggal 21 Oktober 2021. Dalam pertemuan yang diketuai bersama (Co-Chaired) antara Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia dan *Commissioner* ABF *Vice Admiral* Michael Outram APM, dibahas mengenai dampak COVID-19 terhadap kesepakatan keluaran dari pertemuan SOM tahun 2019 serta menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat program kerja sama, seperti memperkuat pertukaran informasi, melanjutkan kerja sama pembangunan kapasitas, serta melanjutkan komitmen untuk secara bersama menyelenggarakan kegiatan MSDE (Bakamla, 2021).

### 3.1.9 Participation at HACGAM (Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting Forum)

HACGAM merupakan forum dialog bagi Pimpinan dari instansi *Coast Guard* pada tingkat kawasan Asia. Ditinjau dari sejarahnya, HACGAM adalah forum dialog regional yang diinisiasi oleh Jepang dan diselenggarakan pertama kali di Tokyo tahun 2004 (Son, 2013). Adapun tujuan HACGAM yaitu untuk pembangunan dan pengembangan kemampuan organisasi *Coast Guard* untuk kawasan Asia melalui diskusi di tingkat kelompok kerja terhadap isu-isu terkait keamanan dan keselamatan laut serta perlindungan lingkungan guna mempromosikan lingkungan maritim

yang lebih bersih, aman, selamat, serta membangun hubungan baik dan saling percaya (hacgam.org).

Walaupun HACGAM secara penamaan cenderung diperuntukan bagi instansi *Coast Guard*, namun pada kenyataannya instansi yang merepresentasikan negara anggota HACGAM tidak seluruhnya instansi *Coast Guard*. Sebagai contoh adalah negara Malaysia instansi yang terlibat adalah *Malaysian Maritime Enforcement Agency* (MMEA), negara Indonesia Bakamla, maupun negara Australia yaitu ABF. Meskipun tidak seluruh instansi berupa *Coast Guard*, tapi forum HACGAM ditujukan bagi instansi sipil penegak hukum di laut atau non militer.

Selain itu, HACGAM tidak hanya beranggotakan negara-negara pada tingkat kawasan Asia saja, melainkan termasuk negara-negara diluar kawasan Asia, seperti Australia. Adapun negara anggota HACGAM yaitu Australia, Bangladesh, Bahrain, Brunei Darussalam, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Jepang, Lao, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, Korea Selatan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Turki, dan Vietnam, serta Hongkong selaku partisipan dan *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre* (ReCAAP ISC) sebagai *Associate Member* (hacgam.org, 2022).

Ditinjau dari penyelenggaraannya, HACGAM merupakan forum dialog yang diselenggarakan setiap tahun/ *annually* oleh negara-negara anggota. Pada tahun 2020, Australia mendapat kesempatan sebagai penyelenggara HACGAM ke 16 namun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 maka penyelenggaraannya dibatalkan (*ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook*, 2020). Mempertimbangkan semakin merebaknya penyebaran virus COVID-19 di seluruh negara, maka keputusan pembatalan penyelenggaraan HACGAM ke 16 sudah tepat guna meminimalisir potensi penyebaran virus.

Selanjutnya di tahun 2021, Vietnam menjadi negara penyelenggara HACGAM ke 17. Berbeda dengan tahun sebelumnya, HACGAM ke 17 berhasil diselenggarakan. Penyelenggaraan HACGAM ke 17 di tengah kondisi pandemi COVID-19, menggunakan metode pertemuan secara virtual atau daring/online. Diketahui dalam penyelenggaraan HACGAM ke 17, turut hadir sebanyak 21 negara diantaranya Republik Rakyat Tiongkok, Australia dan Bahrain (Ministry of National Defence The People's Republic of China, 2021).

Sebagaimana dirilis media sosial resmi ABF, Komisioner ABF Michael Outram menjadi Ketua Delegasi ABF bersama perwakilan dari *Australian Maritime Safety Authority/ AMSA* (ABF, 2021). Adapun partisipasi Bakamla pada kegiatan tersebut adalah Deputy bidang Operasi dan Latihan beserta beberapa perwakilan dari K/L, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Polair, Kementerian Perhubungan dan sebagainya (Bakamla, 2021).

### **3.2 Bentuk dan Tujuan Diplomasi Maritim Pada Kerangka Kegiatan Spesifik antara Bakamla dengan ABF**

Berdasarkan implementasi teknis kegiatan antara Bakamla dan ABF, selanjut akan ditinjau bentuk diplomasi maritim yang diterapkan kedua instansi dimaksud. Dalam kerangka bentuk diplomasi sebagaimana dikemukakan Le Mière, kegiatan *Joint Capacity Building Exercise*, *Ship Search Training* dan *JCLEC Maritime Enforcement Stream* merefleksikan bentuk diplomasi *Training and Joint Exercise*. Hal tersebut didasarkan atas bentuk kegiatan yang diselenggarakan adalah berupa pendidikan, pelatihan, kursus maupun lokakarya sehingga ketiga kegiatan dimaksud dikategorikan sebagai bentuk diplomasi *Training and Joint Exercise*.

Selanjutnya berkenaan dengan tujuan dari bentuk diplomasi yang diselenggarakan kedua instansi cenderung mengarah kepada upaya pembangunan kepercayaan/CBM dibandingkan pada

upaya pembentukan koalisi. Melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sebagainya akan terbentuk keselarasan pemahaman dan pandangan terhadap isu-isu keamanan laut serta menjadi faktor bagi pembentukan ikatan atau jaringan antar personal sehingga kemudian terbangun kepercayaan. Adapun landasan tidak dikategorikannya tujuan diplomasi kedua Negara sebagai upaya pembangunan koalisi karena prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri).

Sehubungan dengan *Maritime Security Cooperation Arrangement* yang menghasilkan dokumen *Arrangement* Bakamla-ABF, kegiatan dimaksud tidak dapat dikategorikan kedalam bentuk diplomasi maritim sebagaimana dikemukakan Le Mière. Hal ini dikarenakan Le Mière hanya membahas dalam konteks definisi yang lebih sempit terhadap bentuk diplomasi maritim kooperatif. Oleh sebab itu, fokus dari bentuk diplomasi maritimnya hanya terkait *Humanitarian Assistance/ Disaster Relief, Goodwill visit, Training and Joint Exercises*, dan *Joint Maritime Security Operations*.

Walaupun demikian, di sisi lain tidak ada penyangkalan terhadap bentuk diplomasi kooperatif lainnya yang turut mendukung pencapaian tujuan diplomasi, apakah itu membangun kepercayaan, membangun pengaruh/*soft power*, atau membangun koalisi. Terkait bentuk diplomasi kooperatif berupa pembentukan *Maritime Security Cooperation Arrangement*, perihal dimaksud merupakan wujud dari pelembagaan formal kerjasama Bakamla-ABF. Melalui pelembagaan kerja sama, maka tercermin konsensus kedua instansi terkait nilai, norma, tujuan bersama maupun peranan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, pembentukan *Maritime Security Cooperation Arrangement* merupakan adalah bentuk diplomasi maritim kooperatif untuk tujuan pembangunan kepercayaan.

Kegiatan terkait *Maritime Domain Awareness Capacity Building, including through information sharing, technical training and exchanges*, kegiatan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk diplomasi maritim kooperatif. Pelaksanaan pembangunan kapasitas melalui pelatihan maupun pendidikan dan bentuk kegiatan lainnya, merupakan bentuk diplomasi berupa *Training and Joint Exercise*. Di lain sisi, kegiatan kunjungan *Counsellor* ABF dan *Operation Officer* MBC ke Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut/KPIML Bakamla tahun 2019 merupakan bentuk diplomasi berupa *Goodwill Visit*.

Disebabkan terdapatnya beberapa kegiatan teknis terkait *Maritime Domain Awareness Capacity Building*, maka identifikasi terhadap bentuk diplomasinya harus melihat berdasarkan kegiatan teknis yang diselenggarakan. Adapun tujuan dari pelaksanaan *Maritime Domain Awareness Capacity Building* adalah untuk membangun kepercayaan antara Bakamla-ABF.

Sehubungan dengan MSDE, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi berupa *Training and Joint Exercises*. Tujuan dari penyelenggaraan MSDE yaitu membangun kepercayaan terhadap negara-negara yang berpartisipasi didalam pelaksanaan kegiatan. Walaupun antara MSDE dengan *Joint Capacity Building Exercise* dan *Ship Search Training* memiliki kesamaan tujuan yaitu membangun kepercayaan, namun konteks pembangunan kepercayaan pada kegiatan MSDE lebih luas dibandingkan dua kegiatan lainnya.

Pembangunan kepercayaan pada pelaksanaan *Joint Capacity Building Exercise* dan *Ship Search Training* lebih ditujukan terhadap beberapa instansi dari suatu negara tertentu dalam jumlah yang relatif sedikit, seperti pembangunan kepercayaan antara Bakamla-ABF atau pembangunan kepercayaan antara ABF, Bakamla, Polair, Detasemen Khusus 88, *Philippine Coast Guard*, dan *Philippine National Police* dalam kegiatan *Vessel Search and Sea Port Intelligence* tahun 2020. Di sisi lain, pembangunan kepercayaan di kegiatan MSDE ditujukan bagi konteks yang

lebih luas yaitu negara-negara dan/atau organisasi internasional di tingkat kawasan, baik itu kawasan Asia maupun di luar kawasan Asia. Oleh sebab itu, MSDE menjadi sarana pembangunan kepercayaan melalui penyelarasan pola pandang dan pemahaman mengenai isu-isu keamanan maupun keselamatan laut serta penerapan hukum laut internasional.

Sehubungan dengan kegiatan *Conduct Joint Capacity Building Exercise between Civilian Enforcement Agencies and Navy including Port Visit*, secara umum kegiatan tersebut diaktualisasikan melalui pelaksanaan Patkor sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi *Joint Maritime Security Operations*. Dikatakannya “dapat dikategorikan” sebagai *Joint Maritime Security Operations* karena terdapatnya perbedaan terminologi antara *Joint Maritime Security Operations* atau *Joint Operations* dengan *Coordinated Patrol*/Patkor selaku nomenklatur yang digunakan di Indonesia. *Joint Operations* adalah pelaksanaan operasi yang memberikan kewenangan bagi kekuatan maritim negara-negara yang terlibat kerja sama untuk melaksanakan patroli di dalam wilayah teritorial negara-negara tersebut (Supriyanto, 2016). Sedangkan *Coordinated Patrol* atau Patkor bahwa setiap negara yang berpatroli berkoordinasi tentang waktu dan wilayah pelaksanaan, serta negara tetangga melaksanakan Patkor di laut teritorialnya tanpa memasuki laut teritorial dari negara lain (Susumu, 2003).

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Patkor lebih kepada pembangunan kepercayaan. Mempertimbangkan bahwa Indonesia-Australia saling terkoneksi melalui laut, maka pembangunan kepercayaan dengan dilaksanakannya Patkor akan meningkatkan kewaspadaan kedua negara terhadap ancaman yang terjadi di lautnya dan meningkatkan interoperabilitas serta membentuk ikatan kuat antara sesama aparat penegak hukum sipil (ABF, MBC, AFMA, Bakamla, dan KKP).

Tidak berbeda jauh dengan *Maritime Security Cooperation Arrangement*, bentuk diplomasi yang tercerminkan pada kegiatan ABF-Bakamla SOM yaitu berupa forum dialog konsultatif reguler tingkat pimpinan instansi. Dalam konteks bentuk diplomasi maritim kooperatif sebagaimana dikemukakan Le Mière, ABF-Bakamla SOM merupakan bentuk diplomasi berupa pertemuan kolaboratif atau *collaborative meetings*.

Terselenggaranya dialog antara pimpinan dan unsur pimpinan kedua instansi menjadikan SOM sebagai saluran komunikasi penyelarasan pola pandang maupun pengambilan keputusan bersama mengenai implementasi kerja sama agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selain itu, ABF-Bakamla SOM merupakan cerminan kehendak kedua instansi untuk membentuk mekanisme konsultatif guna membahas kerja sama yang telah dibentuk. Terdapatnya saluran komunikasi dan mekanisme konsultatif menjadi wujud nyata keinginan membangun kepercayaan.

Sedangkan *Participation at HACGAM* adalah bentuk diplomasi guna meningkatkan partisipasi kedua instansi pada forum dialog tingkat kawasan, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan. Partisipasi Bakamla dan ABF didalam HACGAM menunjukkan terdapatnya kehendak untuk membangun kepercayaan dengan instansi penegak hukum di laut pada tingkat kawasan Asia. Hal tersebut selaras dengan salah satu tujuan dari pembentukan HACGAM yaitu untuk membangun hubungan baik dan saling percaya (Hacgam.org).

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk dan tujuan diplomasi yang diselenggarakan melalui pelaksanaan kegiatan kerja sama Bakamla-ABF, maka implementasi diplomasi maritim yang diterapkan diplomasi maritim kooperatif dengan tujuan membangun kepercayaan. Kemudian atas dasar bentuk diplomasi maritim kooperatif sebagaimana dimaksud, instrumen bagi penyelenggaraan diplomasi maritim kedua instansi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk diplomasi maritim dalam rangka pelebagaan kerjasama (*legal*), sarana



penyelenggaraan kegiatan diplomatik (*diplomatic*), dan terkait penjagaan keamanan di wilayah laut selaku fokus kedua instansi (*maintaining security at sea*).

**Tabel 2.** Instrumen Diplomasi Maritim Dalam Kerangka Kerjasama Bakamla-ABF

INSTRUMEN DIPLOMASI MARITIM DALAM KERANGKA KERJASAMA BAKAMLA-ABF					
No	<i>Form of Co-operative Maritime Diplomacy</i>	<i>Legal</i>	<i>Diplomatic</i>	<i>Maintaining Security at Sea</i>	<i>Confidence Building Measures</i>
1.	<i>JOINT CAPACITY BUILDING EXERCISE (Training &amp; Joint Exercise)</i>	-	✓	-	✓
2.	<i>SHIP SEARCH TRAINING (Training &amp; Joint Exercise)</i>	-	✓	-	✓
3.	<i>MARITIME SECURITY COOPERATION ARRANGEMENT (Institutionalizing Cooperation)</i>	✓	-	-	✓
4.	<i>MARITIME DOMAIN AWARENESS CAPACITY BUILDING, INC THROUGH INFORMATION SHARING, TECHNICAL TRAINING AND EXCHANGES (Training &amp; Joint Exercise or Goodwill Visit)</i>	-	✓	-	✓
5.	<i>MARITIME SECURITY DESKTOP EXERCISE (Training &amp; Joint Exercise)</i>	-	✓	-	✓
6.	<i>JCLEC MARITIME ENFORCEMENT STREAM (Training &amp; Joint Exercise)</i>	-	✓	-	✓
7.	<i>CONDUCT JOINT CAPACITY BUILDING EXERCISE BETWEEN CIVILIAN MARITIME ENFORCEMENT AGENCIES AND NAVY, INC PORT VISITS (Coordinated Patrol/Joint Maritime Security Operation)</i>	-	-	✓	✓
8.	<i>ABF-BAKAMLA SOM (Regular Consultative Dialogue/Collaborative Meetings)</i>	-	✓	-	✓
9.	<i>PARTICIPATION AT HACGAM (Regional Dialogue)</i>	-	✓	-	✓

Sumber: data diolah.

#### IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kerjasama antara Bakamla-ABF masih terselenggara optimal. Walaupun pandemi COVID-19 memberi dampak terhadap penyelenggaraan kegiatan dalam kerangka kerjasama Bakamla-ABF, namun kedua instansi dapat berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi pandemi melalui perubahan metode kegiatan dari yang sebelumnya pertemuan secara fisik menjadi pertemuan non fisik atau *virtual*/daring atau menggunakan metode campuran.

Dalam kaitannya dengan intensitas penyelenggaraan kerja sama, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kegiatan yang sulit untuk tetap diselenggarakan di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan semakin masifnya penyebaran COVID-19, sehingga mendorong pemerintah untuk menerbitkan serangkaian kebijakan guna penanganan pandemi COVID-19 dan pencegahan penyebaran atau penularan virus. Dihadapkan pada situasi dimaksud, maka terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan karena upaya penanganan maupun pencegahan COVID-19 memiliki derajat kepentingan yang lebih tinggi dan menyangkut keselamatan masyarakat.

Di sisi lain, pada tahun 2021 kedua instansi berusaha mendorong agar intensitas kerja sama dapat ditingkatkan. Usaha dimaksud membuahkan hasil positif, dimana kedua instansi berhasil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerjasama Bakamla-ABF yang turut mengikutsertakan partisipasi instansi penegak hukum di laut dari beberapa negara di kawasan Asia. Bahkan, di tahun 2021 telah diselenggarakan kegiatan Patkor Gannet 5 yang dilaksanakan oleh Bakamla, KKP, ABF dan AFMA.

Sehubungan dengan diplomasi maritim, bentuk diplomasi yang teraktualisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan, seluruhnya bertujuan untuk membangun kepercayaan/CBM. Mempertimbangkan Indonesia-Australia merupakan negara yang berbatasan secara langsung di laut, pembangunan kepercayaan di tingkat aparat penegak hukum menjadi penting untuk diwujudkan. Perihal tersebut disebabkan kedua negara cenderung dihadapkan kepada ancaman keamanan laut yang serupa sehingga kepercayaan antara instansi penegak hukum kedua negara menjadi faktor untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik di tingkat teknis operasional.

Adapun rekomendasi bagi pengambil kebijakan terkait implementasi kerjasama Bakamla-ABF yang dapat diusulkan adalah mendorong peningkatan implementasi dan penguatan kerjasama setelah pandemi COVID-19 berakhir. Hal ini dapat ditempuh dengan lebih memperhatikan kapasitas sumber daya terutama terkait kegiatan di bidang sistem informasi, penelitian dan pengembangan, serta kegiatan yang melibatkan unsur patroli. interoperabilitas antar unsur patroli Bakamla-ABF atau MBC perlu dikembangkan..

Selain itu, dalam kerangka kerja sama antara Bakamla-ABF, perlu disusun kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kapasitas masyarakat.

#### Daftar Pustaka

Rijal, Najamuddin Khairur. (2019). *Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia* dalam Global & Strategis Volume 13, Nomor 1 tahun 2019, diunduh pada laman: <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/10494>, tanggal 6 Januari 2022. pp. 63-78

- Son, Nguyen Hung. (2013). *ASEAN-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia: Maritime Security and Cooperation* dalam Beyond 2015 ASEAN-Japan Strategic Partnership for Democracy, Peace, and Prosperity in Southeast Asia. Jepang, Japan Center for International Exchange. pp. 214-227.
- Barston, R.P. (1988). *Modern Diplomacy*. Longman Singapore Publisher.
- Buzan, Barry dan Ole Waever. (2003). *Regions and Powers The Structure of International Security*. New York, Cambridge University Press.
- Le Mière, Christian. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21th Century Drivers and Challenges*. New York, Routledge.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Shoelhi, Drs. Mohammad. (2011). *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Watson, Adam. (2005). *Diplomacy The Dialogue Between States*. Taylor & Francis e-Library.
- ASEAN Regional Forum. *ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook 2020*, diunduh pada laman: <https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2020/10/ARF-Annual-Security-Outlook-21.10.pdf>, tanggal 23 Januari 2022.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI), Kementerian Luar Negeri. (2016). *Diplomasi Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri* diunduh pada laman: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLlAzSyUyME9JLU1VTFRJTUFURVJBTC8xNF9EaXBsb21hc2lfUG9yb3NfTFWfyaXRpbS5wZGY>, tanggal 13 Desember 2021. Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri.
- Laksmiana, Evan A; Iis Gindarsah & Andrew W. Mantong. (2018). *Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi* dalam CSIS Working Paper Series WPSINT-01/2018. Jakarta, Centre for Strategic and International Studies.
- Supriyanto, Ristian. (2016). Publikasi Berjudul *Trilateral Patrols in the Sulu-Sulawesi Seas: Don't Expect too much* diakses pada laman: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/trilateral-patrols-sulu-sulawesi-seas-dont-expect-too-much>, tanggal 27 Januari 2022. Sydney, Lowy Institute.
- Susumu, Takai. (2003). *Suppression of Modern Piracy and the Role of the Navy* dalam NIDS Security Report No. 4 (Maret 2003) diakses pada laman: [http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/bulletin\\_e2002\\_2.pdf](http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/bulletin_e2002_2.pdf), tanggal 27 Januari 2022. Jepang, The National Institute for Defence Studies
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2019). *The 3rd Senior Officials' Meeting Between Australian Border Force and Badan Keamanan Laut of The Republic of Indonesia (Indonesian*

- Coast Guard) (BAKAMLA), Canberra, Australia 28 and 29 March 2019 Record of Discussion.* Jakarta, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Bakamla RI Tahun 2019.* Jakarta, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2020). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on The Law of The Sea Training) Kerja sama JCLEC, Australian Border Force (ABF) dan ANCORS, Semarang, 23 – 27 November 2020.* Jakarta, Kedeputusan Informasi, Hukum dan Kerja Sama, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2021). *Laporan Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) HACGAM 7 s.d. 8 Desember 2021.* Jakarta, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2021). *The 4rd Senior Officials' Meeting Between Badan Keamanan Laut of The Republic of Indonesia (Indonesia Coast Guard/Bakamla) and Australian Border Force 21 October 2021 Record of Discussion.* Jakarta, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2022). *Scorecard Kerjasama Australia.* Jakarta, Direktorat Kerja sama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2022). *Daftar Personel yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan di JCLEC tahun 2019 – 2020.* Jakarta, Bagian Kepegawaian Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
- Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia, 2017.
- Arrangement Between Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (The Maritime Security Agency of The Republic of Indonesia) and The Department of Immigration and Border Protection as Represented by The Australian Border Force on Maritime Security Cooperation, 2017.
- Plan of Action For The Implementation of The Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia, 2018.
- Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 15 Maret 2020.
- Australian Fisheries Management Authority/AFMA. 21 Mei 2021. Rilis Berita berjudul *Indonesia and Australia Conduct Joint Maritime Cooperation, Operation Gannet 5*, diakses pada laman: <https://www.afma.gov.au/news-media/media-releases/indonesia-and-australia-conduct-joint-maritime-cooperation-operation-1>, tanggal 21 Januari 2022.
- Australian Border Force. 31 Januari 2020. Rilis Berita Akun Sosial Media Official Australian Border Force *As part of Australia's cooperation on maritime security, ABF was delighted to deliver two Vessel Search and Seaport Intelligence Courses at #JCLEC in Semarang*, diakses

- pada laman: <https://twitter.com/ausborderforce/status/1223093550071603202>, tanggal 10 Januari 2022.
- Australian Border Force. 3 Desember 2021. Rilis Berita Akun Sosial Media Official Australian Border Force *Recently, we joined our colleagues at JCLEC*, diakses pada laman: <https://twitter.com/AusBorderForce/status/1466639441041178625>, tanggal 23 Januari 2022.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 25 Januari 2021. Rilis Berita berjudul *Tingkatkan Pemahaman Hukum Laut, Bakamla RI Gelar Maritime Regulation and Enforcement Training*, diakses pada laman: [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/tingkatkan-pemahaman-hukum-laut-bakamla-ri-gelar-maritime-regulation-and-enforcement-training](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/tingkatkan-pemahaman-hukum-laut-bakamla-ri-gelar-maritime-regulation-and-enforcement-training), tanggal 19 Januari 2022.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 19 Juni 2021. Rilis Berita berjudul *Bakamla RI Gelar MSDE ke-10 Bersama Australian Border Force*, diakses pada laman: [https://bakamla.go.id/publication/detail\\_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force](https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-gelar-msde-ke-10-bersama-australian-border-force), tanggal 18 Januari 2022.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 19 Juni 2019. Rilis Berita Akun Sosial Media Official Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berjudul *Pertemuan hari kedua, peserta Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) and Law of The Sea Course*, diakses pada laman: <https://www.instagram.com/p/By4ndtbH7GN/>, tanggal 16 Januari 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 30 April 2020. *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*, diakses pada laman: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>, tanggal 4 Januari 2022.
- Ministry of National Defence The People's Republic of China. 2021. Rilis Berita berjudul *China Coast Guard Attends 17th Meeting of the Asian Coast Guard Agencies Heads* by Liu Xin, diakses pada laman: [http://eng.mod.gov.cn/news/2021-12/10/content\\_4900873.htm](http://eng.mod.gov.cn/news/2021-12/10/content_4900873.htm), tanggal 25 Januari 2022.
- Stasiun PSDKP Kupang. 10 Maret 2021. Rilis Berita berjudul *Pegawai PSDKP Kupang Mengikuti Pelatihan Maritime Domain Awareness yang Diselenggarakan JCLEC*, diakses pada laman: <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang/artikel/28584-pegawai-psdkp-kupang-mengikuti-pelatihan-maritime-domain-awareness-yang-diselenggarakan-jclec>, tanggal 13 Januari 2022.
- Tentara Nasional Indonesia. 31 Mei 2019. Rilis Berita berjudul *Bakamla-ABF Sharing Data Informasi Hasil Pantauan Operasi Ganet 19-1*, diakses pada laman: <https://tni.mil.id/view-152159-bakamla-abf-sharing-data-informasi-hasil-pantauan-operasi-ganet-19-1.html>, tanggal 13 Januari 2022.
- WHO. 11 Maret 2020. *WHO Director-General's Opening Remarks at The Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020*, diakses pada laman: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, tanggal 3 Januari 2022.
- Detiknews. tanpa tahun. Rilis Berita berjudul *Personel Bakamla Ikuti Operational Command Course di JCLEC*, diakses pada laman: <https://detiknews.id/detiknews/personel-bakamla-ikuti-operational-command-course-di-jclec/>, tanggal 19 Januari 2022.
- Hacgam.org. *Objective*, diakses pada laman: <https://hacgam.org/about>, tanggal 27 Januari 2022.

Hacgam.org. *Member Organisation*, diakses pada laman: <https://hacgam.org/about>, tanggal 27 Januari 2022.

Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation/JCLEC. 25 Juli 2021. Rilis Berita berjudul *10th Maritime Security Desktop Exercise and Law of the Sea Course*, diakses pada laman: <https://jclec.org/id/10th-maritime-security-desktop-exercise-and-law-of-the-sea-course/>, tanggal 17 Januari 2022.